



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Nomor: Kep/ 26 /XI/2021

tentang

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KERJA DI SATUAN KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas kinerja personel pada Pusat Keuangan Polri maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Pusat Keuangan Polri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Keuangan Polri tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerja di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Sop Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar keberhasilan pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
3. Tindak lanjut hasil pemeriksaaan Itwasum Polri tentang kelengkapan dokumen administrasi pada Pusat Keuangan Polri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI TENTANG PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KERJA DI SATUAN KERJA PUSAT KEUANGAN POLRI
- PERTAMA : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kerja di satuan kerja Pusat Keuangan Polri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dibakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan untuk kepentingan meningkatkan kualitas kinerja di bidang Keuangan agar lebih cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- KEDUA : Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kerja terdiri dari:
- SOP Sub Bagian Perencanaan
 - SOP Sub Bagian Pembina Fungsi
 - SOP Sub Bagian Sumber Daya Manusia
 - SOP Urusan Keuangan
 - SOP Urusan Tata Usaha
 - SOP Bidang Pembiayaan
 - SOP Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - SOP Bidang Verifikasi
 - SOP Bidang Pengendalian
 - SOP Bidang Keuangan Mabes I
 - SOP Bidang Keuangan Mabes II
- KETIGA : Uraian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerja sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 sampai dengan 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2021
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

REKAP SOP PUSKEU POLRI (109 SOP)

A. SUBBAGREN (14 SOP)

1. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA .
2. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PUSKEU POLRI .
3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) .
4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) .
5. PENYUSUNAN USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN IDEAL TAB+1 .
6. PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF .
7. PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN .
8. PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN .
9. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
10. PENYUSUNAN REVISI RKA-K/L DIPA
11. PENYUSUNAN MONEV ANGGARAN .
12. PENYUSUNAN REVISI RKA-KL DIPA SUMBER PLN, RMP, DAN PDN .
13. PENYUSUNAN REVISI RKA-KL DIPA KONTIJENSI RM
14. PENYUSUNAN REVISI RKA-KL DIPA KEGIATAN SATKER

B. SUBBAGBINFUNG (8 SOP)

1. SOSIALISASI PERATURAN/KETENTUAN TENTANG KEUANGAN POLRI
2. MENGHIMPUN SOP SATKER PUSAT KEUANGAN POLRI
3. PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA TEKNIS FUNGSI KEUANGAN POLRI .
4. PENYUSUNAN TABULASI AUDIT KINERJA ITWASUM POLRI
5. PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN KEUANGAN POLRI .
6. PENYUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALIS BIDANG KEUANGAN POLRI
7. USULAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KEUANGAN POLRI ~
8. MELAKSANAKAN ASISTENSI / SUPERVISI .

C. SUBBAGSUMDA (13 SOP)

1. USULAN KENAIKAN PANGKAT (UKP) POLRI .
2. USULAN KENAIKAN PANGKAT (UKP) PNS .
3. USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) POLRI PANGKAT KOMBES POL KE ATAS DAN PNS GOL IV
4. USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGK) POLRI PANGKAT AKBP KE BAWAH DAN PNS GOL III
5. USULAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP) PERSONEL .
6. USULAN PEMBERHENTIAN DARI DINAS AKTIF (PENSIUN) PERSONEL .
7. USULAN PENERBITAN KARTU ASABRI
8. USULAN PENERBITAN KARTU ISTRI/SUAMI
9. USULAN PENERBITAN KARTU PENGENAL/ID CARD MABES POLRI .
10. PROSEDUR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN .
11. INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA .

- 12. PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA .
- 13. USULAN PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI ,

D. URUSAN KEUANGAN (10 SOP)

- 1. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN UANG LEMBUR
- 2. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN UANG MAKAN ASN POLRI
- 3. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN PEMBAYARAN LANGSUNG KONTRAKTUAL
- 4. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN UP/TUP
- 5. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN JALDIS PERSONEL
- 6. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN GAJI PERSONEL
- 7. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER
- 8. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA SATKER
- 9. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN PEMBAYARAN LANGSUNG NON KONTRAKTUAL
- 10. PENGAJUAN PERMINTAAN DAN PENYALURAN DANA KONTIJENSI DUKUNGAN KAPOLRI

E. URUSAN TATA USAHA (5 SOP)

- 1. PELAKSANAAN RAPAT INTERN
- 2. REGISTRASI SURAT MASUK
- 3. REGISTRASI SURAT KELUAR
- 4. ABSENSI
- 5. PENELITIAN NASKAH DINAS

F. BIDANG PEMBIAYAAN (18 SOP)

- 1. PENYALURAN DAN PEMBAYARAN KONTIJENSI (DIREKTIF KAPOLRI)
- 2. LAPORAN PENGEMBALIAN DANA KONTIJENSI
- 3. PENYUSUNAN LAPORAN DANA KONTIJENSI
- 4. PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
- 5. PENYUSUNAN LAPORAN DANA TUNJANGAN KINERJA
- ✓ 6. PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN DANA FPU
- ✓ 7. PENYUSUNAN LAPORAN DANA REIMBURSEMENT FPU
- ✓ 8. PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN JASA RAHARJA
- ✓ 9. PENYUSUNAN LAPORAN DANA JASA RAHARJA
- ✓ 10. PINJAMAN SEMENTARA DANA SAMSAT
- ✓ 11. PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN DANA SAMSAT
- ✓ 12. PENYUSUNAN LAPORAN DANA SAMSAT
- 13. PEMERIKSAAN DAN PEMBAYARAN JALDIS MUTASI
- 14. PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN DAN TAHUNAN DANA JALDIS MUTASI
- ✓ 15. PENGELOLAAN ANGGARAN SUMBER DANA PHLN DAN PDN
- ✓ 16. PENERBITAN SERTIFIKAT PEMBAYARAN (CERTIFICATE OF PAYMENT)
- ✓ 17. PENCATATAN DAN PENDISTRIBUSIAN ADK BARANG/ASET SUMBER PENGADAAN PDN DAN PHLN
- ✓ 18. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PDN & PHLN

- G. BIDANG AKUTANSI PELAPORAN KEUANGAN (12 SOP)
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN POLRI
 2. MEMBUAT KEBIJAKAN DIBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
 3. PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA DIBIDANG AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
 4. ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN PELAPORAN KEUANGAN KE JAJARAN
 5. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN RSB BLU DAN OPERATOR SAIBA
 6. REKONSILIASI PNBPN DENGAN KPPN PENERIMAAN
 7. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI SEMESTERAN/TRIWULAN III/TAHUNAN (UNAUDITED DAN AUDITED)
 8. MENGAJUKAN SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN KE BPK RI SETELAH DISAHKAN OLEH KAPOLRI
 9. REKONSILIASI TIGA PIHAK ANTARA POLRI, BPK RI DAN KEMENKEU TERKAIT ASERSI FINAL LAPORAN KEUANGAN POLRI
 10. MELAKUKAN ANEV ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI
 11. MEMONITOR TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI
 12. MEMONITOR, MENGANALISA DAN EVALUASI DATA SATKER PADA APLIKASI PUSKEU PRESISI DAN APLIKASI LK eREKON DAN LK SETIAP BULAN, PERIODE SEMESTERAN DAN PERIODE AKHIR TAHUN
- H. BIDANG VERIFIKASI (8 SOP)
1. ADMINISTRASI VERIFIKASI
 2. MENERIMA DAN MEREKAP RKA-KL
 3. PENGARSIPAN PERWABKEU KE GUDANG PUSKEU CIPINANG
 4. VERIFIKASI PERWABKEU
 5. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS FUNGSI KEUANGAN
 6. PENYELENGGARAAN ASISTEN
 7. PEMUSNAHAN ARSIP
 8. PENERBITAN DAN PENGIRIMAN NHPW DAN NPHPW
- I. BIDANG PENGENDALIAN (11 SOP)
1. MEMONITOR, MENGANALISA DAN EVALUASI INDIKATOR KINERKA KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PUSKEU PRESISI
 2. KEKUATAN PEGAWAI PADA POLRI
 3. MEKANISME PERMINTAAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN POLRI
 4. PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI PADA POLRI
 5. PERMINTAAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 6. LAPORAN SEWA RUMAH DINAS (RUMDIN)
 7. ARAHAN UPLOAD ADK GAJI
 8. UPLOAD/ INFORMASI PUBLIK KEUANGAN POLRI KE WEBSITE DIV HUMAS POLRI
 9. PENGELOLAAN INFORMASI DOKUMENTASI (PID) INFORMASI PUBLIK PUSAT KEUANGAN POLRI KE WEBSITE DIVHUMAS POLRI

10. LAPORAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
11. PENYEMPURNAAN DAN REVISI PILUN-PILUN KEUANGAN DI POLRI

J. BIDKEU I MABES (5 SOP)

1. PEMBINAAN FUNGSI KEUANGAN PADA SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
2. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN BIDKEU MABES
3. PERMINTAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
4. PENYALURAN DANA KONTIJENSI KEPADA SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
5. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SATKER LAYANAN BIDKEU MABES

K. BIDKEU II MABES (5 SOP)

1. PEMBINAAN FUNGSI KEUANGAN PADA SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
2. PERMINTAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN KINERJA SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
3. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
4. PENYALURAN DANA KONTIJENSI KEPADA SATKER LAYANAN BIDKEU MABES
5. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BIDKEU MABES

Jakarta, 2 November 2021
KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI